



## TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM

Muhammad Ridhwan<sup>1</sup>, Fauzi<sup>2</sup>, Sity Daud<sup>1</sup>

1. Pusat Kajian Strategi, Politik dan Kemanusiaan  
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.  
43600, UKM Bangi Campus, Selangor Darul Ehsan Malaysia  
Email : ridwanmuhammadd@gmail.com, sitydaud@yahoo.com
2. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh  
Jalan Medan – Banda Aceh, Cot Tengku Nie, Releut, Aceh Utara, Indonesia  
Telp : : (0645) 41373, Faks : (0645) 44450, Email : fau\_la@yahoo.co.id

**Abstrak** – Makalah ini membahas tentang kajian – kajian sosial dan politik masyarakat Aceh sebagai suatu pertimbangan pemikiran untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat serta membangun kembali peradaban, tata kehidupan dan struktur sosial yang telah terbangun semenjak dahulu. Pasca perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, bertempat di Smolna the Government Bunked Hall (Balai Pertemuan Finlandia), GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dapat bertemu dan duduk bersama di satu meja untuk mengikrarkan janji, membubuhkan tandatangan dalam (Memorandum of Understanding) MoU Helsinki atas kesepakatan perdamaian, penghentian perselisihan yang telah berlangsung selama hampir tiga puluh tahun lebih. Yang memfasilitasi perdamaian adalah Crisis Management Initiative (CMI), lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari yang memediasi pertemuan perundingan tersebut. Tercapainya kesepakatan perdamaian Aceh merupakan perjalanan panjang dari kedua belah pihak dalam proses negosiasi politik yang alot. Lobi-lobi politik dalam proses perundingan, ditempuh Pemerintah RI melalui pendekatan kemanusiaan dengan mempertimbangkan penderitaan rakyat Aceh harus dihentikan, rusaknya tatanan perekonomian harus disudahi, hancurnya sarana dan prasarana umum serta hilangnya puluhan ribu nyawa masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi telaah para perunding untuk mengakhiri konflik rakyat Indonesia di penghujung barat.

**Keywords:** Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Republik Indonesia, Crisis Management Initiative, negosiasi politik, perjanjian damai.

### I. Pendahuluan

Paska penyerahan senjata ke AMM (*Aceh Monitoring Mission*) menarik untuk dikaji bahwa salah satu kekuatan GAM (*Gerakan Aceh Merdeka*) sudah hilang, dimana dahulunya GAM menggunakan senjata bukan hanya saja untuk pertempuran tetapi senjata juga digunakan untuk penguatan ekonomi GAM untuk mendapatkan biaya operasional dan kebutuhan GAM lainnya. Namun pada masa AMM tahapan penjagaan perdamaian *peace keeping* ekonomi GAM sudah mulai berubah, pada saat itu banyak bantuan – bantuan yang terus mengalir kepada GAM, baik dari NGO maupun dari negara-negara yang peduli terhadap konflik di Aceh<sup>1</sup>. Setelah tahapan perintisan perdamaian *peace making* dan tahapan penjagaan perdamaian *peace keeping* maka dilanjutkan dengan tahapan pembangunan pasca perdamaian *peace building* awalnya ditandai tahapan pembangunan di Aceh yaitu adanya Pemilihan Kepala Daerah yang mandiri,

<sup>1</sup> Syamsyuddin Haris, “MoU Helsinki peluang atau perangkap”, Pusat Penelitian Politik. Jakarta, 2007.

tampak pembangunan politik di Aceh, adanya calon yang maju untuk gubernur, bupati/dan wali kota dari calon perorangan (*independent*), yaitu calon yang bukan dari partai, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh MoU<sup>2</sup>.

Upaya untuk memahami karakteristik masyarakat Indonesia telah banyak dilakukan oleh sarjana barat. Sebuah bangsa di dalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok primordial (etnis, ras, agama) dengan budayanya masing-masing. Kenyataan ini menurut Clifford Geertz,<sup>3</sup> memperkuat persepsi bangsa yang memiliki kesetiaan primordialisme<sup>4</sup> untuk menghadapi kelompok lain di luar bangsa tersebut, yang disebut sebagai *common enemy*. Namun ketika musuh bersama, yang dulunya dihadapi dengan semangat merdeka atau mati, kini secara perlahan-lahan mulai mengumpulkan perbedaan di antara sesama bangsa.<sup>5</sup> Begitu juga dengan semangat primordialisme masyarakat Aceh, seperti ulama besar di Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh sosok ulama yang paling disegani pada abad 20, bukan hanya di Aceh tetapi juga kepulauan lain di luar Aceh, patriotisme terhadap negara tetapi lebih loyal terhadap agamanya. Seperti pada tahun 1950 ketika menolak rencana Soekarno untuk menggabungkan Aceh dengan provinsi Sumatera. Disitulah pertama cikal-bakal lahirnya pemberontakan di Aceh ketika tidak mencapai kesepakatan ajakan Soekarno pada tahun 1953, dan memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan S.M. Kartosoewirjo. Pemberontakan yang berlangsung selama empat tahun akhirnya ditempuh dengan cara damai dimeja bundar yang dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri RI Mr. Hardi yang dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman. Perundingan yang mencapai kesepakatan bahwa Aceh tetap berdiri dibawah provinsi Aceh tidak digabungkan dengan provinsi Sumatera, dan memperoleh otonomi dibidang Pendidikan dan Agama. Janji pemerintah pusat terhadap provinsi Aceh tidak dilaksanakan secara nyata sehingga menjadikan sekedar janji belaka, hingga akhir hayat Mr. Hardi pada tahun 1982 janji itu tidak pernah ditepati oleh Pemerintah RI di Jakarta.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan hal-hal lainnya yang terjadi pada masyarakat Aceh secara pelan-pelan tanpa disadari, seperti LNG di Lhokseumawe, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. AAF, PT. Kraft Aceh, masyarakat hanya bisa melihat keindahan dari luar akan kemegahan perusahaan-perusahaan raksasa di Aceh tetapi tidak pernah merasakan hasil secara nyata. Dari empat industri besar yang ada sejak ditemukannya ladang minyak di Arun, setiap tahun setidaknya diperoleh pendapatan (devisa) sebesar Rp 31 triliun, sementara APBD Propinsi Aceh hanya sebesar Rp. 150 miliar setiap tahun. Berarti tidak sampai satu persen hasil bumi Aceh yang dikembalikan ke daerah asalnya.<sup>7</sup> Kekecewaan masyarakat Aceh terlihat ketika munculnya Aceh Merdeka (AM) dan dirubah menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kemunculan GAM merupakan salah satu dari kekecewaan terhadap sistem kapitalis yang terstruktur di Aceh, dan munculnya konflik antara pusat dan daerah Provinsi Aceh. Setelah perjalanan konflik yang begitu panjang Aceh - RI pernah melakukan dialog damai dengan GAM pada tahun 2003, namun akibat penanganan yang tidak serius perjanjian COHA gagal total sehingga dilanjutkan perdamaian abadi MoU Helsinki 2005.

## II. Ekonomi Politik GAM pada Masa Perintisan Perdamaian Peace Making (2003 – 2005).

Pada fase *peace making* ekonomi politik GAM masih dalam keadaan tidak stabil karena GAM masih melakukan perlawanan secara gerilya melawan TNI Republik Indonesia, GAM masih membutuhkan pertahanan pangan secara umum dan dikelola bersama bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi anggota GAM, tetapi untuk perjuangan mencapai kemerdekaan yang telah dicita-citakan oleh GAM dalam landasannya, untuk penguatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara seperti pengutipan *pajak nanggroe*<sup>8</sup> untuk mendukung perjuangan mereka, *pajak nanggroe* itu kutipan dana dari masyarakat yang dilakukan GAM semasa konflik, dan semasa perintisan perdamaian *pajak nanggroe* masih aktif dilakukan.

*Pajak nanggroe* merupakan strategi ekonomi politik GAM yang sangat efektif dalam masa 2003-2005. Besarnya *pajak nanggroe* sangat variatif dan biasanya beban yang ditimpakan kepada pengusaha jauh lebih besar. Akan lebih besar lagi jika *pajak nanggroe* tersebut dibebankan kepada pejabat pemerintah RI. Untuk mempertahankan persatuan GAM, *pajak nanggroe* merupakan peran utama yang dilakukan oleh GAM sebagaimana yang dikatakan oleh Sofyan Daud dalam pledoi yang disampaikan di PN Banda Aceh, 9 Oktober 2003, Sofyan menyebutkan bahwa pengutipan *pajak nanggroe* menunjukkan bahwa GAM sudah diakui eksistensinya dalam masyarakat Aceh. Kesediaan masyarakat, pengusaha dan perusahaan vital di Aceh membayar pajak kepada GAM, menurut Sofyan, karena rakyat sudah mengikuti administrasi GAM. Menurut Juru Bicara Militer GAM, Teungku Sofyan Dawood, dana itu selain digunakan untuk operasional GAM, juga digunakan untuk menyantuni masyarakat yang menjadi korban konflik bersenjata, juga

<sup>2</sup>. Syamsyuddin *Ibid.*, hlm. 2

<sup>3</sup>. Liat Clifford James Geertz (San Francisco, 23 Agustus 1926–Philadelphia, 30 Oktober 2006)

<sup>4</sup> Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.

<sup>5</sup> Lihat Indonesia File, "Dari Majapahit hingga Indonesia Raya", <http://indonesiafile.com>, diakses tanggal, 5, April, 2010.

<sup>6</sup> Floriberta Aning. S, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*, Yogyakarta: Narasi, 2005, hlm. 63-64.

<sup>7</sup> Lihat Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, dan Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

<sup>8</sup> *Pajak Nanggroe* (Bhs. Aceh), pajak negara; pajak yang dikutip oleh GAM kepada masyarakat Aceh.

dimanfaatkan sebagai modal menyiapkan infrastrukturnya pemerintahannya jika kelak merdeka.<sup>9</sup> Namun *pajak nanggroe* juga berakhir setelah penandatanganan nota kesepahaman damai di Helsinki 15 Agustus 2005.

*Fase peace making* bukan hanya *pajak nanggroe* yang menjadi penguatan ekonomi politik GAM, tetapi mereka akan melakukan apa saja yang menurut mereka tidak bertentangan dengan norma. Menurut apa yang dikatakan oleh responden diatas bahwa GAM dalam mempertahankan ekonomi politiknya akan melakukan apa saja yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh. Norma ini biasanya telah ditetapkan dalam pemerintahan GAM sendiri baik yang berupa batasan yang bisa dilakukan maupun yang tidak bisa dilakukan oleh kombatan GAM, sehingga kutipan *pajak nanggroe* boleh digunakan untuk membeli senjata dan amunisi sebagai persiapan untuk melawan TNI, dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan perjuangan GAM.

Istilah *pajak nanggroe*, sudah lama terdengar di Aceh, khususnya saat konflik berkecamuk. *Pajak nanggroe* adalah sejenis setoran kepada pihak GAM dari pengusaha atau dari proyek-proyek yang dibangun di daerah basis-basis mereka. Sistemnya resmi, seperti pajak yang kita kenal sekarang. mereka menetapkan jumlah pajak sesuai dengan jenis proyek dan besaran anggaran dari proyek tersebut. Dan saat CoHA, pihak GAM juga menerbitkan sejenis surat yang berisi tentang pembayaran pajak dari sejumlah pengusaha dan proyek vital yang ada di Aceh. Seperti yang diungkapkan salah seorang anggota POLRI Yusnidar yang membelot ke GAM dia beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh GAM merupakan hal yang benar dan dia merasa bahwa perjuangan kemerdekaan Aceh merupakan hak yang harus diperjuangkan. Walaupun setelah bergabung dengan GAM dia mulai merasakan penderitaan dan yang sangat pedih yaitu ketika melahirkan anak dihutan dalam kondisi peperangan melawan TNI, dan yang lebih meyakini hatinya ketika suaminya meninggal dalam peperangan melawan TNI setelah beberapa hari melahirkan bayi, suami Yusnidar juga merupakan mantan POLRI yang membelot ke GAM. Berbeda sebelum bergabung dengan GAM yang sebelumnya diinstansi POLRI mereka ada sedikit kesejahteraan yaitu gaji yang didapatkan setiap bulan.

Bila dianalisa lebih dalam beralihnya sebagian anggota polisi ke GAM disebabkan semangat primordialisme, teori yang pernah diutarakan oleh Clifford Geert, Sebuah bangsa di dalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok primordial (etnis, ras, agama) dengan budayanya masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Yusnidar anggota POLRI yang membelot ke GAM tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Teungku Daud Beureueh. Daud Beureueh merupakan Gubernur militer yang membelot ke DI/TI karena menganggap bahwa bangsa Aceh sudah dikhianati oleh pemerintah RI. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Yusnidar bisa saja dia menganggap bahwa bangsanya telah dijajah oleh pemerintah RI. Setelah fase perintisan perdamaian *peace Making* maka berlanjut ke fase pelestarian perdamaian *peace keeping* nota kesepahaman MoU Helsinki di Aceh mesti di jaga oleh kedua belah pihak supaya damai di Aceh tetap sepanjang masa, tahapan *peace keeping* penjagaan terhadap MoU maka dibentuklah AMM. Demi terciptanya perdamaian yang abadi maka tahap awal sepakat untuk dibentuknya tim pemantau internasional yang diberi nama *Aceh Monitoring Mission* (AMM).

### III. Ekonomi Politik Masa *Peace Keeping*

Tahapan *peace keeping* tahapan pemantauan perdamaian merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan perdamaian yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, pada tahapan ini aktivitas GAM sudah mulai berubah mereka sudah mulai turun gunung karena kedua pihak telah dengan berani bersikap untuk berdamai. Pihak pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk melepaskan sejumlah kewenangan pemerintahan, hukum, politik, sumberdaya alam, ekonomi, dan beberapa butir penting lainnya kepada pemerintah Aceh dan menarik TNI non organik dari Aceh. Begitu juga GAM siap untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi Republik Indonesia, dan rela senjatanya dipotong demi terciptanya perdamaian. Demi tercapai perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. GAM harus merelakan senjatanya dipotong, namun GAM juga akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah Republik Indonesia, namun janji pemerintah tersebut belum seratus persen terealisasikan hanya sebagian mantan kombatan GAM saja yang menerimanya, itupun setelah mereka menerima bantuan kompensasi tidak ada perubahan dengan status pendapatan mereka sama dengan mantan kombatan GAM yang tidak menerima bantuan kompensasi dari pemerintah Republik Indonesia.

Perdamaian di Aceh memberikan kompensasi kepada pihak yang bertikai dan hal ini bukan hanya di Aceh saja tetapi hampir di semua belahan di dunia ketika berhadapan dengan pemulihan ekonomi memilih kompensasi sebagai salah satu cara untuk penyelesaiannya. Maka pihak yang menerima bantuan kompensasi selalu akan membutuhkan bantuan karena kompensasi dipergunakan untuk konsumtif sebagaimana yang dikatan oleh Moch. Nurhasim “korban konflik tetap menjadi korban yang akan terus membutuhkan bantuan”. Kondisi pada masa lalu dimana konflik yang berkepanjangan ditambah dengan gempa bumi dan gelombang tsunami membuat masyarakat Aceh mengalami kemunduran hampir di semua bidang, pada masa konflik aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan lancar, sektor produksi dan pelayanan jasa terganggu akibat ketidakpastian kondisi keamanan. Para mantan anggota GAM yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan RI meninggalkan pekerjaan dan mata pencaharian perekonomiannya karena konflik, kondisi keamanan tidak memungkinkan untuk menetap ditengah-tengah masyarakat, para anggota mantan-GAM yang mempunyai pekerjaan sebagaimana masyarakat biasa yaitu di sektor pertanian, perkebunan, nelayan, perdagangan dan

<sup>9</sup> Lihat Tempo, 21, April, 2003.

sektor jasa. Pada saat konflik memuncak mereka meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan kampung halaman untuk bergerilya ditengah hutan dengan memanggul senjata.

Kesempatan Helsinki mengamanatkan agar para mantan anggota GAM untuk kembali ke masyarakat. Hal ini termasuk dalam pemulihan ekonomi para mantan GAM ke aktivitas di tengah masyarakat. Mengembalikan mantan GAM ke masyarakat biasanya bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena pada masa konflik ada sebagian masyarakat yang bergabung dengan GAM sedang beranjak dewasa dan belum pernah bekerja di sektor manapun, sehingga pada masa damai harus dikembalikan seperti masyarakat biasa memulai pekerjaan baru. Sementara itu, kondisi masyarakat GAM yang pernah bekerja juga tidak lebih baik dengan pekerjaan yang telah ditinggal lama, mengharuskan mereka untuk beradaptasi kembali, bahkan pada sektor-sektor tertentu seperti, mereka harus memenuhi kembali usaha mereka dari kegiatan awal. agak sulit untuk menemukan lapangan pekerjaan yang baru. Hampir di semua daerah di Aceh, GAM yang kembali ke masyarakat sipil harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Seringkali kelompok rentan (termasuk GAM yang kembali, pengungsi, dan korban lainnya) tidak mampu melakukan adaptasi untuk perekonomian mereka. Setelah kembali ke tengah masyarakat.

Untuk mengetahui hal ini, perlu suatu strategi yang komprehensif yang harus dilakukan di bidang ekonomi, dan sosial. Bantuan awal untuk para mantan GAM, tahanan politik dan korban konflik lainnya diterima pada tiga tahun pantauan proses damai berlangsung, tapi bantuan ini tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pemasukan yang rutin dan berlangsung terus menerus untuk dijadikan pendapatan sehari-hari. Para mantan-kombatan GAM perlu mata pencaharian yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kehidupan normal ditengah masyarakat, yaitu pekerjaan yang bisa memberikan pendapatan berkelanjutan. Ekonomi GAM setelah penandatanganan MoU 15 Agustus 2005 belum stabil, karena mereka baru saja turun gunung dan meninggalkan semua aktifitas yang berkaitan dengan peperangan, tentu mereka tidak mempunyai apa-apa dan semua kebutuhan mereka pada saat itu dibantu oleh keluarga dan masyarakat setempat. Apalagi pada saat konflik GAM tidak mengenal kepemilikan ekonomi pribadi, artinya semua dana yang didapatkan semasa konflik digunakan untuk keperluan seluruh mantan GAM secara berjamaah.

Sebagian GAM setelah kembali kedalam masyarakat paska perdamaian tidak mempunyai harta benda apapun yang bisa dijadikan modal untuk membangun usaha, disebabkan oleh faktor belum pernah berkecimpung diusaha manapun bias dikatankan saat bergabung dengan GAM mereka sedang meranjak dewasa namun setelah perdamaian para mantan GAM yang kembali kedalam masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan, sehari-hari. kebutuhan Sebagian GAM harus ditanggung oleh keluarganya dan saudara-saudara dekat, hanya sebagian dari mantan kombatan GAM yang bisa mempertahankan hidup dari bantuan kompensasi pemerintah untuk bisa melakukan proses sosial.

Dapat diambil pemahaman bahwa setelah perdamaian masuknya berbagai donatur ke Aceh menyalurkan bantuan bagi korban konflik namun bantuan yang diberikan oleh donatur dan NGO lebih kepada konsumtif dimana bantuan dipergunakan untuk keperluan sementara dan tidak bisa dimanfaatkan jangka panjang, akhirnya pihak korban yang menerima bantuan tersebut selalu akan memerlukan bantuan. Sebagian mantan kombatan GAM yang tidak ada perubahan status pekerjaannya paska konflik, dan ada juga mantan kombatan GAM yang berprofesi sama seperti sebelum konflik, semasa konflik dan paska konflik. Kedatangan petugas pemantau perdamaian AMM, NGO, dan negara donor tidak berpengaruh dengan status pekerjaan sebagian GAM.

Paska perdamaian ekonomi mantan kombatan GAM tidak menentu dalam status pekerjaannya, malahan lebih mempunyai peran status pekerjaannya semasa konflik, bagi masyarakat yang berdomisili di luar negeri akan mendapatkan kemudahan dalam berusaha dianggap sebagai pengungsi yang menghindari dari konflik di Aceh dibawah pengamanan PBB,<sup>10</sup> tidak seperti yang dirasakan oleh keluarga kombatan GAM di Aceh. Berlainan bagi GAM yang punya potensi mereka mendapatkan peluang untuk bekerja di instansi-instansi pemerintah, seperti di BRR, dan ditempat lain sebagainya. Kesempatan untuk bergabung dengan NGO dan instansi pemerintah kebanyakan dari mereka yang punya skill lebih dan mereka biasanya dari insan kampus. Ekonomi mereka paska perdamaian agak meningkat dibandingkan dengan masyarakat biasa yang hanya menerima bantuan dari NGO atau masyarakat korban konflik umumnya.

#### IV. Ekonomi Politik Masa Pembangunan *Peace Building*

Setelah tahapan perintisan perdamaian *peace making* dan tahapan pejagaan perdamaian *peace keeping* berakhir, maka dilanjutkan dengan tahapan pembangunan perdamaian *peace building*, GAM siap untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi Republik Indonesia, dan rela senjatanya dipotong demi terciptanya perdamaian dan Aceh mempunyai wewenang yang luas dalam mengatur pemerintahannya. Awalnya ditandai tahapan pembangunan di Aceh yaitu adanya Pemilihan Kepala Daerah yang mandiri, tampak pembangunan politik di Aceh, adanya calon yang maju untuk gubernur, Bupati/dan Wali Kota dari calon perorangan (*independent*), yaitu calon yang bukan dari partai, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh MoU Helsinki 15 Agustus 2005 Berdasarkan Pasal 75 ayat (1)<sup>11</sup> Undang Undang

<sup>11</sup> Lihat Undang Undang Pemerintahan Aceh Berdasarkan Pasal 75 ayat (1)

Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah atau PP.No.20/2007 tentang partai lokal disebutkan, penduduk Aceh dapat membentuk partai lokal.

Kemenangan para mantan-GAM dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh dan di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh, telah mengembalikan berbagai keuntungan politik bagi kelompok mantan-GAM ke “lingkar pendopo”. Dimana pada saat pemilihan kepala daerah mantan-GAM dengan semangat memperjuangkan rekannya sesama mantan-GAM untuk bisa lolos menjadi kepala daerah dan bisa mengantar rekannya sesama mantan-GAM ke “lingkaran pendopo”, setelah kepala daerah dimenangkan oleh mantan-GAM disinilah lahirnya politik balas budi, dimana kepala daerah yang dimenangkan oleh mantan GAM tadi akan mendapatkan proyek dari kepala daerah yang juga dari GAM. Ada yang menjadi tim sukses pada saat pemilihan kepala daerah tersebut akan mendapatkan proyek-proyek besar, baik yang berasal dari APBD maupun yang dari APBN, ada yang menjadi kontraktor atau program-program yang dilingkari oleh APBD sebagai balas budi politik dari anggota GAM yang menjadi kepala daerah. Ekonomi politik mantan GAM harus diupayakan semaksimal mungkin bila tidak akan berdampak negatif terhadap pembangunan Aceh kedepan, seperti Melalui jaringan mantan GAM dimana mereka bisa mendapatkan uang atau pemasukan dari beberapa tokoh GAM yang masuk ke dalam wilayah pemerintahan. Dari hal tersebut lebih menitik beratkan pada aspek perilaku “kegagalan pemerintah dalam memimpin Aceh kedepan untuk menjaga perdamaian yang hakiki.

Walaupun MoU Helsinki telah mengamanahkan untuk meninggalkan *pajak nanggroe* di Aceh, namun ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga melakukan aktivitas *pajak nanggroe* secara tersembunyi. Maka disinilah sangat kita harapkan kepada semua pihak saling berpartisipasi untuk memerangi *pajak nanggroe*. Pemerintah harus bisa menjembatani permasalahan-permasalahan mantan GAM dan Korban Konflik baik dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), perkebunan, dan industri supaya ekonomi mantan GAM dan masyarakat korban konflik stabil dan begitu juga dengan politik harus diberi pemahaman-pemahaman yang bersifat positif untuk meningkatkan derajat bangsa. Ekonomi mantan GAM dapat diarahkan dengan membuka lapangan pekerjaan dengan mengundang investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanam modal di Aceh, dan membuka industri demi untuk menampung pekerja-pekerja baru atau membuka lahan-lahan sektor penghijauan disamping dapat membuka lapangan pekerjaan juga akan menambah APBA dan APBD dengan terbentuknya lapangan pekerjaan yang berbadan hukum.

Pada tahapan *peace making* ekonomi GAM sudah mulai mapan dan sebagian masih belum ada perubahan, ada yang sudah melebihi dari cukup kebanyakan mereka adalah GAM yang aktif dalam bidang kontruksi, pengadaan, jasa dan lain-lain, usaha-usaha yang sudah tergolong dalam aktivitas ekonomi menengah keatas. Sedangkan GAM yang ekonominya lemah kebanyakan dari kalangan GAM bawahan, sulit untuk melakukan perubahan dalam dunia usaha kerja disebabkan jaringan dan lobi mereka lemah tidak mencapai target. Karena sangat sulit melakukan akses-akses seperti yang dilakukan GAM kelas atas. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi politik pada masa *peace making* maka peneliti menggolongkannya kedalam beberapa pokok unsur pembangunan.

## V. Pengaruh GAM dalam Pembangunan di Aceh

Pemerintahan di Aceh sama dengan teori *ersatz kapitalism* yaitu penguasa dan pengusaha sekongkol untuk memperkaya diri mereka sendiri, sangat ditakutkan dimana suatu masa apabila yang kaya tanpa mempedulikan kalangan miskin akan terjadi perlawanan secara politis, apalagi seperti mantan kombatan yang lahir dari masyarakat dan atas dukungan masyarakat. Mereka dapat menguasai parlemen dan bisa mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Pembangunan ekonomi yang dicita – citakan oleh mantan GAM saat ini masih sebatas wacana dan belum ada tindakan nyata yang jelas. Banyak permasalahan yang bisa menghambat pembangunan di Aceh umumnya dan banyaknya hambatan itu muncul dari tubuh GAM sendiri.

Karena ada sebagian mantan GAM yang mengkambing-hitamkan pembangunan untuk keperluan pribadi, untuk mendapatkan pemasukan yang lebih. Sebagian mantan kombatan GAM lebih memilih menjadi senator, atau menduduki jabatan Eksekutif dan keterlibatan mantan – kombatan GAM dalam proses politik lokal yang merupakan langkah penting dalam proses perdamaian Aceh. Pemilihan Kepala Daerah ini juga berpotensi memiliki dua peran kunci dalam membangun perdamaian jangka panjang: yaitu untuk memperkuat cara-cara persaingan politik yang sehat antara para elit lokal Aceh, dan untuk membangun landasan bagi tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengembangan kebijakan yang efektif di Aceh. Kemenangan mantan GAM juga yang akan menentukan arah pembangunan di Aceh kedepan dan siapa yang diuntungkan ketika mereka menguasai pemerintahan.

Dapat dipahami bahwa, selama GAM berperan dalam pengambil kebijakan di Aceh pembangunan yang dilakukan hanya sedikit diakibatkan dari ketidak seriusan GAM dalam membangun Aceh, dalam pembangunan GAM lebih mementingkan kalangannya sendiri dan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Sehingga peluang pembangunan masyarakat banyak tidak ada sumber daya yang ada di Aceh sudah dimanfaatkan oleh GAM yang dekat dengan pemerintahan. Pasca GAM menguasai pemerintahan mereka memainkan peran *ersatz kapitalism* sebagaimana yang dikatakan oleh Yoshihara Kunio “campur tangan pemerintah terlalu banyak” kebijakan dibuat untuk kepentingan kalangan pengambil kebijakan dan pengusaha dari kalangan mereka. Proyek proyek pembangunan fisik lebih diutamakan dikerjakan oleh kalangan kontraktor dari GAM, hanya beberapa kalangan dari masyarakat biasa yang dapat mengakses proyek pembangunan itu jikalau mereka bisa berpartisipasi dengan kalangan pembuat kebijakan. Seperti

proyek pembangunan jembatan Cunda yang dikerjakan oleh Bangun PT.Cipta Konstruksi bersama PT. Pulau Gading yang juga merupakan kontraktor dari GAM.<sup>12</sup>

Ekonomi politik yang dilakukan yang dilakukan oleh GAM dapat dilihat dari segi pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah seperti pemberian modal usaha untuk masyarakat yang ekonominya lemah. Tapi walaupun pembangunan sudah diupayakan belum semua masyarakat menengah kebawah bisa mendapatkan pembangunan, diakibatkan karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Walaupun dia sendiri yang korban konflik belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah, GAM lebih mementingkan kelompok mereka sendiri dalam mengakses sumber daya yang ada di Aceh, disini dapat kita lihat bahwa GAM telah melahirkan ‘birokrat kapitalis’, sebagaimana yang dikatakan oleh Guillermo O’Donnel dalam buku Ekonomi Politik dan Struktur Politik Orde Baru yang ditulis oleh Mochtar Mas’oed, birokratis bersifat birokratik-teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik dalam pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses tawar-menawar yang lama diantara berbagai kelompok dan kepentingan. dimana mereka menggunakan kekuasaan untuk mengakomodir modal untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.

Selama kemenangan GAM dalam parlemen di Aceh hampir seluruh proyek pembangunan di Aceh dikuasai oleh GAM, baik proyek yang berbentuk pembangunan infrastruktur maupun proyek pengembangan swadaya masyarakat. merosotnya pembangunan di Aceh salah satu faktor adalah tidak adanya transparansi pembangunan, proyek yang bekerja ditentukan oleh pihak pemerintah kebiasaannya lelang hanya sekedar administrasi pemerintahan, seperti banyak proyek pekerjaan infrastruktur publik di Aceh yang sumber dananya dari APBA, tidak terdapat papan nama proyek, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik tidak transparan berarti ada yang disembunyikan dari pembangunan tersebut. Setiap pembangunan biasanya pihak-pihak pengelolaan anggaran berkoordinasi dengan Satuan Kerja perangkat Kabupaten SKPK, tetapi bagian tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Banyak program tersebut dikerjakan oleh kontraktor dari GAM, dan kebanyakan kontraktor dari GAM biasanya menyewa perusahaan milik pengusaha lain untuk bisa mengerjakan proyek yang diberikan oleh pihak GAM yang ada di pemerintahan.

Banyak mantan – kombatan GAM yang melakukan pekerjaan fisik setengah hati, dalam arti kata mereka banyak yang aktif dikontraktor ketika ada proyek saja dengan menyewa perusahaan rekannya untuk menjalankan proyek tersebut. Permasalahan ini dapat dianalisa bahwa setelah GAM menguasai parlemen, maka keadaan ekonomi politik di Aceh menjadi sedikit mundur. Ini dibuktikan dengan sulitnya memperoleh pekerjaan dan sukarnya mengembangkan roda perekonomian masyarakat. Sehingga GAM hanya memberikan bantuan pekerjaan sesama mantan kombatan GAM, artinya GAM yang ada dipemerintahan Aceh sering membagi-bagikan proyek kepada rekan – rekannya begitupula dengan pihak diluar pemerintahan tidak semua merasakannya. Pemerintah dari GAM telah memainkan peran kapitalisme birokrat, Sebagaimana yang dikatakan oleh sosiolog Arief Budiman “tumbuh kelas birokrat kapitalis yang menguasai berbagai institusi pemerintahan”, kelompok birokrat yang menggunakan kekuasaan birokrasinya untuk melakukan akumulasi modal. Apa yang dikatakan oleh Arief Budiman sangat tepat sebagaimana yang disampaikan oleh responden bahwa pemerintahan Aceh yang didominasi oleh GAM membentuk koalisi untuk mengumpulkan modal untuk memperkaya diri dengan membagikan proyek lebih banyak kepada kalangannya sesama GAM dibandingkan dengan masyarakat biasa.

## VI. Kapitalisme Semu Baru di Aceh

Pemerintahan memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya kelompok pembuat kebijakan dan pengusaha yang memanfaatkan pemerintah untuk merekomendasikan usahanya. Mereka memerankan kapitalisme semu *ersatz kapitalism* Seperti yang dikatakan oleh Yoshihara Kunio di Indonesia disebutkan “Ali-Baba”, Ali digunakan untuk para birokrat yang memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi, Baba para pengusaha yang berkoalisi dengan penguasa birokrat untuk kepentingan mereka.

Pasca kemenangan GAM telah terbentuk kelas sosial baru hasil MoU Helsinki pada Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum legislatif. Adanya orang baru di jajaran eksekutif dan legislatif di Aceh tentu saja diharapkan akan membawa perubahan. Tapi “naik kelas” secara ekonomi saja atau dengan sebutan “dari tidak kaya menjadi kaya”, “dari tidak berkuasa menjadi berkuasa”, masalah ini bukanlah mobilitas sosial yang sehat dan menjamin adanya perubahan. Status sosial baru untuk jajaran eksekutif dan anggota parlemen baru masih harus dibuktikan lewat kinerja yang baik untuk memajukan Aceh dan mensejahterakan rakyatnya. Jika saat ini sebagian besar anggota parlemen Aceh memperoleh status sosial baru karena partai lokal yang menang, ke depan diperlukan kerja keras untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang lebih layak jadi anggota dewan yang terhormat dibandingkan yang sebelumnya atau yang kalah dalam Pemilihan Umum. Artinya, harus dibuktikan bahwa status sosial baru yang diperoleh itu bukan sekedar karena adanya jatah atau giliran (*ascription*), tapi karena adanya prospek untuk kinerja yang baik (*achievement*).

Hal ini perlu diingat karena status sosial tidak hanya diperoleh dengan modal ekonomi dan sosial. Ada tiga jenis modal yang menempatkan orang pada kelas tertentu: modal ekonomi, sosial, dan modal kultural. Modal ekonomi adalah

<sup>12</sup> <http://www.pu.go.id>

kekuasaan atas sumber daya ekonomi seperti uang dan harta. Modal sosial adalah modal karena keanggotaan dalam kelompok tertentu, jaringan pengaruh, kekerabatan dan dukungan dari faktor-faktor primordial lainnya. Sedangkan modal kultural adalah modal pendidikan, keahlian dan berbagai bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Suatu peradaban yang maju biasanya ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang mempunyai modal kultural yang banyak. Tidak ada yang salah dengan adanya kelas sosial baru di Aceh. Selama orang kaya baru tidak memiskinkan orang kaya lama atau orang kaya lainnya, apalagi orang yang sudah miskin mestinya semua ikut senang. Tidak ada salahnya jika makin banyak orang kaya di Aceh, keadaan ini akan keadaan kehidupan masyarakat bisa jadi makin baik. Asal jangan yang kaya makin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin.

Kalau satu orang dalam usahanya menjadi kaya memiskinkan satu orang lain maka ini adalah malapetaka konflik kepentingan. Misalnya, jika seorang pejabat baru atau seorang legislator baru menjadi kaya lewat korupsi, kolusi dan nepotisme, maka bisa dipastikan bahwa dia telah memiskinkan atau minimal memupuskan harapan satu orang atau bahkan banyak orang lainnya. Tetapi jika seseorang menjadi kaya dan berkuasa dengan benar dan setelah kaya mempunyai kepedulian yang tinggi untuk membuat Aceh menjadi makmur maka dia bukan hanya kaya untuk diri sendiri atau kelompoknya. Dari pandangan dua responden diatas dapat dianalisa pasca pemerintahan dikuasai oleh GAM telah terbentuk kelompok sosial baru seperti terbentuknya pasukan *pideung* di Sawang, mereka lahir akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan dari orang mereka sendiri. Pasca Ilyas A. Hamid dan Syarifuddin memegang peran sebagai Bupati dan wakil Bupati tidak ada pemerataan pembangunan sehingga mereka sepakat untuk membentuk kelompok baru. Mereka menganggap pemerintahan Aceh tidak adil dalam pembangunan dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin tambah miskin sehingga tidak ada perbedaan antara pemerintahan GAM dengan pemerintahan yang bukan dari GAM.

Pernyataan responden diatas dapat diambil pemahaman bahwa paska perdamaian telah terbentuk kelompok yang tidak menerima perdamaian. Mereka adalah juga kelompok GAM yang tidak setuju apa yang telah diputuskan di Helsinki. Menurut apa yang dikatakan M. Zubir kelompok GAM tersebut diberi nama Pasukan *pideung*, mereka menganggap apa yang telah dilakukan oleh GAM dalam perdamaian adalah mengingkari janji sesama GAM, dimana semasa konflik setiap yang bergabung dengan GAM disumpah untuk setia dengan perjuangan kemerdekaan Aceh dan tidak berkhianat, dalam arti kata tidak berpaling ke pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah harus bisa menjembatani permasalahan-permasalahan mantan GAM dan Korban Konflik baik dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) supaya ekonomi mantan GAM dan masyarakat korban konflik stabil dan begitu juga dengan politik harus diberi pemahaman-pemahaman yang bersifat positif untuk meningkatkan derajat bangsa. Ekonomi mantan GAM dapat diarahkan dengan membuka lapangan pekerjaan dengan mengundang investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanam modal di Aceh, dan membuka industri demi untuk menampung pekerja-pekerja baru. Atau dengan membuka lahan-lahan sektor penghijauan disamping dapat membuka lapangan pekerjaan, juga akan menambah APBA dan APBD dengan terbentuknya lapangan pekerjaan yang berbadan hukum. Aceh membutuhkan perencanaan induk (*master plan*) reintegrasi untuk memulihkan ekonomi mantan GAM dan masyarakat korban konflik yang sudah terpuruk akibat konflik dan tsunami<sup>13</sup>. Dimana Aceh harus membuat program jangka pendek dan panjang untuk menanggulangi perekonomian Aceh.

Untuk meningkatkan ekonomi mantan – GAM dan masyarakat korban konflik, pemerintah harus membenahi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk bangun dari ketertinggalan dan keterpurukan pasca konflik dan gelombang tsunami yang telah melanda Aceh. Pemerintah terutama sekali harus meningkatkan penataan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi di Aceh. Sebab syarat kemajuan suatu daerah apabila daerah tersebut mempunyai peraturan perundangan yang bisa memberi motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Program pendataan administrasi masyarakat mantan-GAM, dan korban konflik yang masih tertinggal dibidang ekonominya. Program kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi mantan – GAM dan masyarakat korban konflik merupakan keharusan untuk pembangunan yang keberlanjutan.

Lahirnya pasukan *pideung* dan kelompok sosial lainnya dapat dianalisis dari teori primodialisme yang dilahirkan oleh Clifford Geertz,<sup>14</sup> dia mengatakan bahwa kelompok sosial dapat hadir karena “etnis, ras, agama (kefahaman)” dapat dipahami bahwa seperti lahirnya pasukan *pideung* adalah akibat ketidakpuasan terhadap apa yang telah diputuskan oleh GAM untuk berdamai, dan telah damai dihadapkan dengan berbagai kekurangan dalam menghadapi ekonomi mantan kombatan GAM sehingga timbul perpecahan antara kelompok mereka sendiri. Kelas sosial juga dapat terbentuk karena konflik sosial antar “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu: *pertama*, kelas sosial baru dapat terbentuk karena Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadapan-melawan negara dan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum.

<sup>13</sup> Kompas, 13 Maret 2005

<sup>14</sup> Clifford James Geertz (San Francisco, 23 Agustus 1926–Philadelphia, 30 Oktober 2006) adalah seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Ia paling dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang seperti agama (khususnya Islam), perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga. Terkait kebudayaan Jawa, ia mempopulerkan istilah *priyayi* saat melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa pada tahun 1960-an, dan mengelompokkan masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan: *priyayi*, *santri* dan *abangan*.

## VII. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan Pasca penandatanganan MoU Helsinki 2005 dapat kita simpulkan ekonomi politik GAM dibagi tiga fase yaitu *Peace Making*, *Peace Keeping* dan *Peace Building*, Fase *pertama peace making* adalah fase sejak perintisan perdamaian mulai dari perdamaian yang ditengahi oleh HDC sampai dengan perintisan perdamaian CMI-MoU Helsinki Firlandia 2003-2005. Dalam fase ini terdapat berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi politik GAM, dapat dipahami bahwa masa ini adalah masa konflik dimana pada saat itu tidak ada hukum dan peraturan yang dapat dijalankan dengan tegas, peran yang dimainkan adalah menang kalah, pihak yang menang dialah yang harus dianggap benar, ada *tiga* (3) fase, yaitu *peace making*, *peace keeping* dan *peace building*.

*Pertama* ekonomi politik GAM pada fase perintisan perdamaian *peace making* tidak terarah, diketahui dari wawancara yang telah dilakukan, bahwa mereka sering mendapatkan pendapatan dari sumbangan suka rela dari masyarakat, pajak *nanroe*, sumbangan dari pengusaha (*entrepreneur*) serta dari pejabat di Aceh yang diperoleh dengan cara baik-baik maupun dengan cara paksa. Dan setiap anggota GAM tidak dibolehkan mencari uang ataupun apapun yang bersifat berharga untuk milik pribadi, tetapi semua itu boleh didapatkan untuk milik jamaah yaitu milik kebersamaan keseluruhan anggota GAM yang memperjuangkan kemerdekaan. Banyak masyarakat yang bergabung dengan GAM pada usia beranjak dewasa dimana banyak dari kalangan yang baru selesai dari pendidikan SMP dan SMA, bahkan ada yang tidak menamatkan studinya dan bergabung dengan GAM, sebagian kombatan GAM ada dari institusi pemerintah yang membelot ke GAM semasa konflik seperti yang dikatakan oleh responden dalam wawancara, ada sebagian dari kesatuan POLRI yang berbelot ke GAM. Setelah perdamaian mereka agak mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena sebelum bergabung dengan GAM mereka sudah mengenal aktivitas untuk mencari nafkah. Dapat dipahami bahwa ekonomi GAM semasa konflik sepenuhnya dilakukan untuk memperkuat kapasitas GAM dalam peperangan melawan TNI. Dengan hal demikian setelah perdamaian sangat sulit bagi mereka untuk menemukan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

*Kedua*, adalah fase *peace keeping*, fase ini merupakan fase yang sangat menarik untuk diketahui. Fase setelah fase perintisan perdamaian *peace making* dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 maka mulailah fase *peace keeping* yaitu sari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Dimana setelah ada keputusan dari petinggi RI dan GAM untuk menyepakati perdamaian di Aceh dan mengakhiri semua penindasan dan penderitaan rakyat Aceh. Dimulai dari 15 Agustus 2005 sampai dengan berakhirnya tugas AMM dalam mengawasi perdamaian di Aceh baik dalam mengawal penarikan tentara non organik, mengawasi penyerahan senjata dari GAM untuk dipotong, mengawasi reintegrasi kompensasi mantan, dan pengembalian aktivitas mantan kombatan GAM kedalam masyarakat biasa, artinya tidak lagi melakukan intimidasi propaganda untuk mencari keuntungan atas nama GAM untuk kepentingan pribadi.

Dalam wawancara diatas banyak hal yang bisa diambil sebagai kesimpulan ekonomi politik mantan kombatan GAM diantaranya adalah bahwa ekonomi politik pada fase *peace keeping* sebagian mantan kombatan GAM di Aceh Utara mendapat peningkatan dalam usaha kerja diantara mereka adalah yang mendapat pekerjaan sebagai representatif dari GAM untuk menjaga perdamaian dengan AMM. Dan sebagian dari mereka mendapat bantuan dari pemerintah sebagai kompensasi yang telah dijanjikan oleh pemerintah RI. Tetapi tidak semua kesempatan ini dirasakan oleh mantan-kombatan GAM, dalam fase ini ada juga sebagian mantan-GAM yang tidak mendapatkan perubahan dalam status kerja, dan tetap bekerja sebagaimana biasanya baik sebelum perdamaian maupun sesudah perdamaian. Kebanyakan dari mereka adalah yang sudah mempunyai lahan pekerjaan sebelum bergabung dengan GAM. Ekonomi sebagian mantan kombatan GAM pada fase *peace keeping* tidak ada kejelasan, kebanyakan dari mereka yang bergabung dengan GAM pada usia beranjak dewasa, sehingga setelah perdamaian mereka tidak mempunyai pengalaman, dan skill untuk dapat bekerja.

*Ketiga* adalah fase *peace building*, fase ini dimulai setelah perdamaian di Aceh dianggap positif dan AMM mulai meninggalkan Aceh yaitu dari tahun 2007 sampai dengan sekarang dan *fase peace building* juga merupakan fase untuk meningkatkan ekonomi mantan kombatan GAM dan masyarakat luas. Fase ini dimulai sejak tim pemantauan perdamaian Aceh AMM meninggalkan provinsi Aceh kembali kenegara masing-masing, dan perdamaian Aceh diserahkan kepada pemerintahan RI, GAM dan masyarakat Aceh untuk melestarikannya. Salah satu tanda dari adanya pembangunan di Aceh dapat diukur dari pemilihan calon kepada daerah dapat diikuti sertakan dari non partai *independen*, dan kebanyakan yang memenangkan untuk menjadi kepala daerah mereka dari GAM hampir diseluruh Kabupaten/Kota, termasuk kabupaten Aceh Utara dimenangkan oleh orang GAM yaitu Ilyas A. Hamid sebagai Bupati, dan Syarifuddin sebagai wakil Bupati Aceh Utara.

Selama pemerintahan dikuasai oleh GAM bermacam pandangan dari segala kalangan menyorot mereka, ada sebagian mengatakan selama pemerintahan GAM ada sedikit pembangunan, namun lebih banyak kalangan yang mengatakan selama pemerintahan dikuasai oleh GAM pemerintahan Aceh Utara mengalami kemunduran yang sangat signifikan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, maupun dari pembangunan pembangunan yang lain. Untuk melihat lebih jauh dapat dilihat dari hasil wawancara diatas. Pasca pemerintahan Aceh Utara dikuasai oleh GAM ada sedikit pembangunan namun mayoritas adalah untuk mereka dari kalangan GAM, pembangunan untuk kaum GAM adalah sebagai politik balas budi yang telah mendukung sesama mereka untuk menjadi orang nomor satu di kabupaten Aceh Utara. Pemerintahan GAM membantu sesama mereka kebanyakan dalam bentuk pemberian proyek fisik, dan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan LSM seperti pemberian lahan hutan garap yang dikelola oleh



GAM yaitu Tengku Ahmad di Blang, dan lahan untuk mantan kombatan lainnya. Sedangkan mantan kombatan GAM yang tidak dekat dengan pemerintahan kebanyakan mereka tidak tersentuh dengan pembangunan, apalagi mereka tidak mempunyai pendidikan dan skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.

Pembangunan untuk masyarakat Aceh Utara sangat minim, diakibatkan dari bobroknya pemerintahan GAM yang yang tidak sanggup melakukan gebrakan untuk melakukan pembangunan yang berdampak baik bagi masyarakat luas. Akhirnya akan melahirkan kelas-kelas sosial baru di Aceh. Lahirnya kelas kelas sosial baru di Aceh paska pemerintahan dikuasai oleh GAM, dari obsevasi dilapangan ada dua kelompok kelas yang lahi di Aceh Utara yaitu: *Pertama*, kelompok yang mempertahankan ideologi GAM sebelum perdamaian yang diberi nama Pasukan *Pideung*, bahkan kelompok ini benci kepada pemerintah dari GAM sendiri. Ada dua alasan mereka membentuk kelompok baru yaitu; Tidak sependapat dengan pembangunan yang dilakukan oleh GAM dan mereka ingin mempertahankan ideologi mereka sebelum konflik. Pasuka *Pideung* terpusat di Sawang namun anggotanya dari seluruh wilayah Pase, pasukan *Pidueng* terdiri dari GAM yang sependapat dengan mereka. Namun pada akhir tahun 2009 *Pasukan Pideung* tidak lagi nampak berkeliaran seperti tahun tahun sebelumnya. Menurut responden diatas karena ada pihak GAM yang sudah mengajak Pasukan *Pideung* untuk kembali bersatu dengan GAM.

*Kedua*, kelas sosial yang terdiri dari masyarakat biasa, dimana pasca pemerintahan dikuasai oleh GAM hanya kalangannya, dan kalangan yang terdekat sajalah yang dapat mengakses sumber daya yang ada di Aceh Utara. Dapat dikatakan telah lahir kelompok Kapitalis baru di Aceh Utara dimana yang kaya dan mempunyai modal makin menumpukkan harta sebanyak-banya mungkin, sedangkan selain dari kelompok mereka. Sedangkan kelompok lain baru bisa mengakses sumberdaya dengan melakukan pendekatan dengan kelompok GAM kapitalis tersebut. Sedangkan masyarakat yang tidak padai dalam melakukan pendekatan selalu akan merasa tertindas dan selalu bekerja untuk kaum kapitalis tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, rekomendasi yang dapat diusulkan oleh Peneliti agar kedepan dalam hal pembangunan ekonomi politik baik untuk mantan-kombatan GAM maupun untuk masyarakat biasa ialah: adanya keseimbangan dalam pembangunan ekonomi politik di Aceh Utara, dalam arti lain pemerintahan dari GAM harus netral dan seadil-adil mungkin dalam pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan dalam pembangunan akan menghindarkan perpecahan dan terbentuknya kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat yang kontra terhadap pemerintahan dari GAM di Aceh serta pembangunan dengan mudah dan cepat untuk dilakukan .

## Penghargaan

Penulis mengucapkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas bantuan dan terlaksananya penelitian kajian sosial dan masyarakat Aceh Utara setelah pasca perjanjian perdamaian antara GAM dan Pemerintah RI. Serta pihak – pihak yang telah membantu mempersiapkan pertemuan dan wawancara.

## Rujukan

- [1]. Kunio, Yoshihara, *Militer Dan Kapitalisme Ersatz: Bisnis ABRI Pada Masa Orde Baru*, Yogyakarta: Aditya Media, 1994, Hlm. 80.
- [2]. Mas' oed, Mochtar, *Ekonomi Politik dan Sruktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
- [3]. Reid, Anthony, "*Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*", (terj), Jakarta: Yayasan Obor, 1993, hlm.,10.
- [4]. Aspinall, Edward, "*Pemilihan Umum Konsolidasi Perdamaian*", Consiliation Resources, December 2006.
- [5]. Indonesia File, "*Dari Majapahit hingga Indonesia Raya*", <http://indonesiafile.com>, akses, 5, April, 2010.
- [6]. Aspinall, Edwar, "*Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace In Aceh*", <http://cip.cornell.edu> ,Akses, 28 Januari 2010.
- [7]. Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, dan Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- [8]. Lihat Clifford James Geertz (San Francisco, 23 Agustus 1926–Philadelphia, 30 Oktober 2006).
- [9]. Floriberta Aning, S, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*, Yogyakarta: Narasi, 2005.
- [10]. Syamsyuddin Haris, "*MoU Helsinki peluang atau perangkap*", Pusat Penelitian Politik. Jakarta, 2007.